

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Saberi Thanoor, ST
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Noormiliyani AS
Jabatan : Bupati Barito Kuala
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

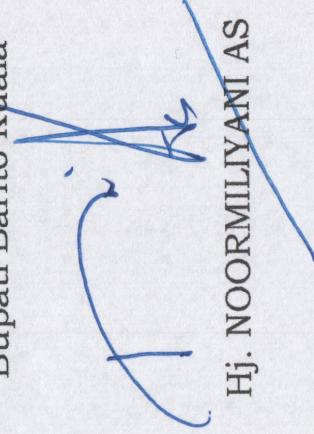
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Februari 2019

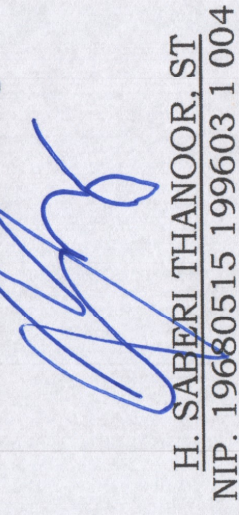
Pihak Kedua,

Bupati Barito Kuala


Hj. NOORMILIYANI AS

Pihak Pertama,

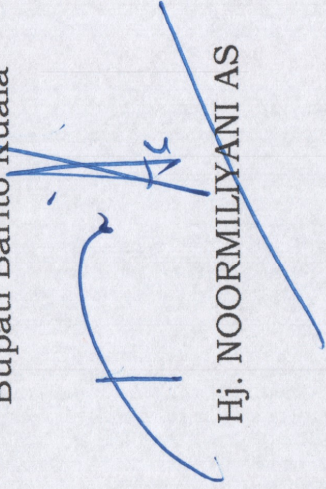
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang


H. SABERI THANOOR, ST
NIP. 19680515 199603 1 004

Marabahan, 1 Februari 2019

Pihak Kedua,

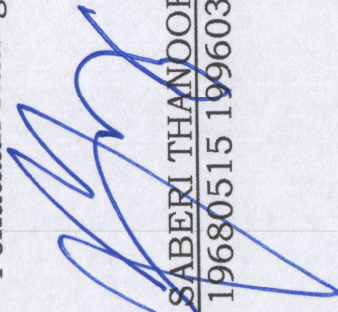
Bupati Barito Kuala



Hj. NOORMILYANI AS

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang



H. SABERI THANDOOR, ST
NIP. 19680515 199603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas	Persentase Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi	65	62	62,5	63	65
		Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	67,5	67	67,2	67,3	67,5
		Persentase rancangan produk hukum Penataan Ruang	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
		Persentase penyedia jasa dan pengguna yang bersertifikat	55	50	52	53	55
		Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	75	72	72,5	73	75
		Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	62,04	52	54	55	62,04
		Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	6,26	5,50	5,60	6,00	6,26
		Persentase timbulan sampah yang terangkut	85	82	83	84	85
		Persentase luas RTH	0,630	0.625	0.626	0.627	0.630

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.051.025.000	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 9.366.883.076	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 178.500.000	
4.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp. 82.661.787.000	
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 4.127.723.325	
6.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp. 1.010.000.000	
7.	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Rp. 440.000.000	
8.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 85.371.400	
9.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp. 10.684.407.000	
10.	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Rp. 179.378.650	
11.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp. 126.100.000	
12.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rp. 1.582.762.500	
13.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rp. 15.684.699.000	
14.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 23.085.754.370	
15.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp. 7.503.663.750	
16.	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rp. 3.849.628.875	
17.	Program Pembangunan sarana / prasarana fasilitas umum	Rp. 7.164.651.630	
18.	Program pengaturan jasa konstruksi	Rp. 140.015.000	
19.	Program pemberdayaan jasa konstruksi	Rp. 348.795.000	
20.	Program pengawasan jasa konstruksi	Rp. 26.315.000	
21.	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 356.678.250	
22.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 178.790.250	